



LAKIP
(Laporan Akuntabilitas Kinerja)
TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LEBONG

Tahun Anggaran 2018

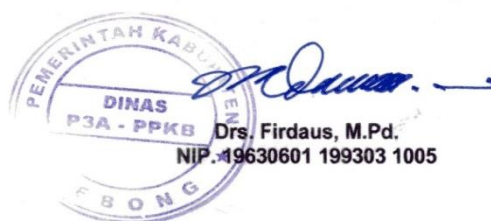
KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya yang tidak terhingga sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Lebong dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan.

Sesuai Amanat Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan wujud pertanggung jawaban Pemerintah kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program kegiatan selama satu tahun anggaran dalam rangka evaluasi capaian kinerja dengan melakukan perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tahun bersangkutan.

Kami sadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu segala saran dan kritikan yang konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk perbaikan pada masa akan datang. Terima kasih.

Lebong, Februari 2019
Kepala



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Tupoksi dan Struktur Organisasi DP3A-PP dan KB Kabupaten Lebong

1.4 Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana DP3A-PP dan KB Kabupaten Lebong

BAB II Perencanaan Strategis dan Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis DP3A-PP dan KB Kabupaten Lebong

2.2 Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja DP3A-PP dan KB Kabupaten Lebong

BAB III Capaian Kinerja, Analisis dan Realisasi DP3A-PP dan KB Kabupaten Lebong

3.1 Capaian Kinerja Organisasi DP3A-PP dan KB Kabupaten Lebong

3.2 Analisis Capaian Kinerja DP3A-PP dan KB Kabupaten Lebong

3.3 Realisasi Anggaran DP3A-PP dan KB Kabupaten Lebong

BAB IV Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif yang merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Para pemangku kepentingan yang terlibat dapat digolongkan menjadi 3 domain yaitu state atau lembaga pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif daerah, private atau swasta yaitu pelaku-pelaku dunia usaha baik perorangan maupun lembaga, society atau masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan *dokumen* perencanaan di daerah. Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Dalam hal ini, setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

RPJMD merupakan sebuah dokumen perencanaan yang bersifat strategik yang akan mengarahkan segenap sumber daya untuk mencapai visi pembangunan daerah. Selain itu, RPJMD adalah bagian dari komponen sistem akuntabilitas pemerintah daerah yang akan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan. Mengingat

pentingnya RPJMD bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, proses penyusunan RPJMD dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan peran para pemangku kepentingan pembangunan. Berdasarkan alasan inilah maka penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pasal 1 menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 33 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerah, oleh sebab itu perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP dan KB) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagai SKPD yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana selain melaksanakan tugas sesuai dengan tufoksinya, agar dapat memberikan pelayanan yang baik, pelayanan prima, akuntabilitas kinerja dan untuk mewujudkan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP dan KB) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan salah satu faktor penentu untuk mewujudkan keinginan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lebong Setiap Tahunnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DP3A-PP dan KB Dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018.

b. Tujuan

1. Untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja Kinerja DP3A-PP dan KB berdasarkan target yang telah ditulis sebelumnya.
2. Untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran 2018

1.3 Tupoksi dan struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong

Sebagai unsur perangkat daerah yang menangani masalah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A-PP dan KB dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. DP3A-PP dan KB mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam menyelenggaraan tugas pokok tersebut, DP3A-PP mempunyai fungsi :

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Seksi Pengarusutamaan Ekonomi;
 2. Seksi Pengarusutamaan Sosial, Politik dan Hukum;dan

3. Seksi Pengarusutamaan Kualitas Keluarga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 1. Seksi Jaminan Ber-KB;
 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:

Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perencanaan; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan Kesejahteraan keluarga.

Unit Pelaksana Teknis

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sesuai dengan tugas masing-masing.

KEPEGAWAIAN

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1.4 Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana DP3APP dan KB Kabupaten Lebong

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP dan KB) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 memiliki 31 orang laki laki dan perempuan.

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP dan KB) Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

Kondisi Pegawai menurut pendidikan yaitu sebagai berikut:

(1) Doktor	:	
(2) Strata 2/S2	:	4
(3) Sarjana Muda/S1	:	23
(4) DIII	:	
(5) DII	:	1
(5) SMA /Sederajat	:	3
(6) SMP/Sederajat	:	-
(7) SD/sederajat	:	-

Kondisi pegawai menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

(6) Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1 orang
(7) Pembina Tingkat I(IV/b)	:	-
(3) Pembina (IV/a)	:	5 orang

(4)	Penata Tk I (III/d)	:	12 orang
(5)	Penata (III/c)	:	6 orang
(6)	Penata Muda TK.I (III/b)	:	5 orang
(7)	Penata Muda (III/a)	:	-
(8)	Pengatur Tk I (II/d)	:	-
(9)	Pengatur (II/c)	:	1 orang
(10)	Pengatur muda TK.I(II/b)	:	1 orang
(11)	Pengatur muda (II/a)	:	-
(12)	Juru tk.I (I/d)	:	-
(13)	Juru (I/c)	:	-
(14)	Juru Muda TK.I(I/b)	:	-
(15)	Juru Muda (I/a)	:	-

Kondisi pegawai menurut eselonisasi dan jabatan fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP dan KB) Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Pegawai Berdasar Jabatan

No	Uraian	Tahun 2017
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	5 orang
3	Eselon IV	15 orang
4	Jabatan Fungsional umum	7 orang
5	Jabatan Fungsional tertentu	3 orang

2.3 KINERJA PELAYANAN DP3AP2KB Kab.Lebong

Tabel 2.
Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kab.Lebong

BIDANG	PELAYANAN	SASARAN
Bidang KB dan keluarga Sejahtera	Pelatihan, KIE, Dialog Warga, Advokasi dan Sosialisasi	Remaja, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Dinas/Instansi Terkait, LSM
Bidang Pengendalian Penduduk	Pelatihan PLKB, Pengumpulan, pengolahan dan analisa data, Advokasi, Evaluasi dan	Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Lembaga kemasyarakatan

	Pelatihan	
Bidang P2TP2A	Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan	LSM, Dinas/Instansi Terkait, Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan Korban kekerasan
Bidang PUG	Sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, Pelatihan	Kelompok Masyarakat, LSM, SKPD, Stakeholders terkait
Sekretariat	Pelayanan kelancaran administrasi internal	Bidang dan subbid DP3AP2KB

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lebong melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Memberdayakan perempuan Lebong sebagai salah satu anggota masyarakat yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lebong
3. Membentuk kabupaten Lebong sebagai kabupaten yang memberdayakan perempuan dan kabupaten hukum yang berpihak pada perempuan dan anak
4. Menjadikan kabupaten Lebong sebagai kabupaten yang membantu menggalakkan program KB dan pengendalian penduduk sebagai program nasional
5. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi aparatur guna memberdayakan perempuan, anak, pengarusutamaan gender, pengendalian penduduk serta keluarga berencana guna tercapainya pelayanan yang prima
6. Menjadi Instansi yang dekat dengan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat berkaitan dengan memberdayakan perempuan, anak,

pengarustamaan gender, pengendalian penduduk serta keluarga berencana

- 7.** Menjadi Penghubung di antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan hukum demi membela hak perempuan dan anak demi kesejahteraan bersama
- 8.** Menjadi Instansi yang bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dengan program KB dan pengendalian penduduk

BAB II

Perencanaan Strategis dan Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. RPJMD Visi dan Misi Kabupaten Lebong

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di susun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Lebong tahun 2016-2021. RPJMD 2016-2021 di tujukan untuk memantapkan pembangunan kabupaten Lebong yang berkaitan dengan permasalahan tingginya Kemiskinan dan Pengangguran.

Program dan kegiatan pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong, mengacu pada Program Pembangunan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021, yaitu dalam upaya menunjang terhadap pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Lebong : **“ Terwujudnya Kabupaten Lebong Maju, Mandiri dan Sejahtera”**.

- Kabupaten Lebong: meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya kabupaten Lebong dan warganya yang berada dalam suatu wilayah dengan batas batas tertentu yang berkembang sejak pemekaran dari kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2003
- Kabupaten Lebong yang “Maju”: di maknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata . peningkatan kualitas kehidupan adalah dimana terjadi mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran di banding daerah lain. Lebih merata di maknai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah. Tingkat kemajuan masyarakat di nilai berdasarkan ukuran , di tinjau dari indikator sosial, dan kualitas sumber daya manusianya. Masyarakat di katakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian ,berahlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.
- Kabupaten Lebong yang “mandiri”: adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya , mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya,mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan

sumberdaya yang di miliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan .

- Kabupaten Lebong yang sejahtera : di amknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhannya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalm kehidupan.

Misi di susun dalam rangka mengimplementasikan langkah langkah yang akan di lakukan dalam mewujudkan visi yang telah di paparkan di atas.

Tabel 3
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	MISI
Terwujudnya Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera	Mewujudkan SDM yang berkualitas
	Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan publik yang baik
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis IPTEK
	Mewujudkan pengelolaan SDA yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan
	Mewujudkan tingkat kualitas hidup masyarakat yang lebih baik

b. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Lebong

1. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Lebong:

“Terwujudnya kesetaraan dan Keadilan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak serta keluarga kecil bahagia sejahtera dan berwawasan kependudukan”

2. Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, DP3APP dan KB kabupaten Lebong menetapkan Misi yaitu:

- a) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
Misi ini mengandung makna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan membangun kelembagaan penanggulangan kekerasan serta penelantaran anak
- b) Meningkatkan KB dan kesehatan reproduksi
- c) Misi ini mengandung makna meningkatkan komunikasi informasi edukasi (KIE), pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan pelayanan bermutu dan fasilitas terjangkau Meningkatkan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- d) Menonjolkan persamaan hak dan gender dengan mengutamakan permasalahan gender di kabupaten lebong.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas maka DP3AP2KB menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.

Tujuan dan Sasaran Kinerja

No	Tujuan	Sasaran
1	Optimalnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi di DP3APP dan KB
2	Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur	Meningkatnya Jumlah Laptop, Printer, peralatan kantor, gedung, dll
3	Meningkatnya kualitas PNS di Kab. Lebong	Bertambahnya pakaian PNS dan Non PNS
4	Meningkatkan disiplin apartur pemerintah	Bertambahnya pakaian PNS dan Non PNS
5	Tersedianya Laporan Keuangan dan Dokumen SKPD di Kab. Lebong	Tersedianya Laporan Keuangan dan Dokumen DP3APP dan KB
6	Meningkatnya kualitas PNS di Kab. Lebong	Meningkatnya kualitas PNS di DP3APP dan KB
7	Tersedianya Laporan Keuangan dan Dokumen SKPD di Kab. Lebong	Tersedianya Laporan Keuangan dan Dokumen BPM-PP dan KB
8	Meningkatnya Kualitas	Meningkatnya

	Hidup Perempuan di Kab. Lebong	pemberdayaan, Kualitaskehidupan Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menunjang ketahanan keluarga
9	Meningkatnya Pelayanan terhadap perempuan dan Anak korban kekerasan di Kab. Lebong	Tersedianya Pelayanan terhadap perempuan dan Anak korban kekerasan
10	Meningkatnya pemberdayaan, Kualitaskehidupan Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menunjang ketahanan keluarga dalam pembangunan di Kab. Lebong	Meningkatnya pemberdayaan, Kualitaskehidupan Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menunjang ketahanan keluarga
11	Meningkatnya kebijakan bagi perempuan dan anak di kab. Lebong	Meningkatnya kebijakan bagi perempuan dan anak
	Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan pada lembaga yang berbasis gender di kab. Lebong'	Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan pada lembaga yang berbasis gender
12	Meningkatnya Sarana, Pelayanan, dan Pembinaan Keluarga Berencana di Kab. Lebong	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
13	Meningkatnya Jumlah Akseptor KB di Kab. Lebong	Meningkatnya Jumlah Akseptor KB di Kab. Lebong
14	Meningkatnya Fasilitas bagi PLKB/PKB, PPKBD dan Sub PPKBD di Kab. Lebong	Meningkatnya Fasilitas bagi PLKB/PKB, PPKBD dan Sub PPKBD
15	Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaja di Kab. Lebong	Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaja
16	Meningkatnya Kesehatan Ibu, bayi dan anak di Kab. Lebong	Meningkatnya Kesehatan Ibu, bayi dan anak
17	Berdirinya Konseling KRR di Kab. Lebong	Adanya Pelayanan Konseling KRR
18	Tertanggulangnya Narkoba, HIV/AIDS di	Tertanggulangnya Narkoba, HIV/ AIDS

	Kab. Lebong	
19	Terkendalinya penambahan penduduk di Kab. Lebong	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
20	Meningkatnya informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Kab. Lebong	Meningkatnya informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
21	Berkembangnya Model Operasional BKB-Posyandu-PADU di Kab. Lebong	Berkembangnya Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

4. Penetapan Indikator perjanjian Kerja DP3AP2KB Tahun 2018

Tabel 5
Indikator perjanjian Kerja DP3AP2KB Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Optimalnya pelayanan Administrasi Perkantoran	PNS dan non PNS	100%
2	Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana prasarana penunjang tugas Aparatur	100%
3	Meningkatnya kualitas PNS di Kab. Lebong	Meningkatnya kualitas PNS di DP3APP dan KB	100%
4	Meningkatkan disiplin aparat pemerintah	Bimtek bagi PNS	100%
5	Tersedianya Laporan Keuangan dan Dokumen SKPD di Kab. Lebong	Laporan Keuangan dan	
6	Meningkatkan kualitas hidup perlindungan Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup perempuan	24
7	Menguatkan kelembagaan Pengarustamaan Gender dan anak	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	18
8	Meningkatnya Partisipasi perempuan dan anak	Jumlah Eselon Perempuan di bagi	22

	sebesar 5 %	Jumlah seluruh eselen di kali 100	
9	Terserasikannya kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase meningkatnya kebijakan terhadap perempuan dan anak yang dirumuskan (%)	24
10	Menguatnya Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Persentase meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga yang berbasis gender (%)	21
11	Cakupan /Prevelensi Peserta KB aktif (SPM/IKK)	Persentase terkendalinya/Penurunan angka kelahiran (%)	17
12	Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Meningkatnya Pelayanan bagi Akseptor KB (%)	20
13	Terbinanya peran sera masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri	Persentase fasilitas bagi petugas PLKB/PKB, PPKBD dan Sub PPKBD (%)	16
14	Terlaksananya kesehatan reproduksi remaja	Persentase Meningkatnya remaja (siswa Smp/sma) yang mendapat advokasi (%)	25
15	Meningkatnya kesehatan Ibu Bayi dan Anak	Persentase Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan anak (%)	25
16	Berkembangnya Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR	Persentase Meningkatnya persentase pelayanan bagi remaja yang mau melakukan konseling KRR (%)	25

17	Meningkatnya Penanggulangan Narkiba, PMS termasuk HIV AIDS	Persentase Meningkatnya Siswa yang mendapat Sosialisasi (%)	25
18	Tersedianya Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase Meningkatnya Jumlah Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga (%)	25
19	Berkembangnya Bahan Informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak	Persentase meningkatnya informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	25
20	Berkembangnya model Operasional BKB Posyandu Padu	Jumlah Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	25

Untuk mencapai target tersebut di atas maka di lakukan berbagai macam kegiatan sebagai berikut:

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1 Penyediaan jasa surat menyurat
- 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6 Penyediaan alat tulis kantor
- 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8 Penyediaan makanan dan minuman
- 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1 Pengadaan peralatan gedung kantor

- 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 3 Program peningkatan disiplin aparatur**
 - 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - 1 Pendidikan dan pelatihan formal
- 5 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**
 - 1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
 - 2 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
- 6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**
 - 1 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
 - 2 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
 - 3 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
 - 4 Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera
- 7 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**
 - 1 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan
- 8 Program Keluarga Berencana**
 - 1 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
 - 2 Pembinaan Keluarga Berencana
 - 3 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
 - 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana
- 9 Program pelayanan kontrasepsi**
 - 1 Pelayanan KB Untuk Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan
 - 2 Pelayanan KB Untuk Kegiatan TMKK
 - 3 Pelayanan konseling KB
 - 4 Pelayanan KB medis operasi
- 10 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**
 - 1 Fasilitasi Operasional Penyuluh KB

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong . Dimana penetapan kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya untuk mengetahui celah kinerja. Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. pada Tahun 2018 ini merupakan tahun Pertama Pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021 yang dijabarkan kedalam Renstra, Untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Lebong di sajikan dalam capaian indikator Kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi tahun ini serta realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional melalui indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3APP&KB) Kabupaten Lebong adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah

Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3APP&KB) telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilan

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi di DP3APP dan KB	PNS dan Non PNS
Meningkatnya Jumlah Laptop, Printer, peralatan kantor, gedung, dll	Laptop, printer, Peralatan Kantor, Kendaraan dan Gedung kantor, dll
Bertambahnya pakaian PNS dan Non PNS	Pakaian PNS dan Non PNS
Meningkatnya kualitas PNS di DP3APP dan KB	Bimtek bagi PNS
Tersedianya Laporan Keuangan dan Dokumen BPM-PP dan KB	Laporan Keuangan dan Dokumen SKPD
Meningkatnya pemberdayaan, Kualitas kehidupan Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menunjang ketahanan keluarga	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Meningkatnya pemberdayaan, Kualitas kehidupan Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menunjang ketahanan keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Meningkatnya kebijakan bagi perempuan dan anak	Perempuan dan Anak
Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan pada lembaga yang berbasis gender	Perempuan di Lembaga yang berbasis gender
Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Persentase Akseptor KB
Meningkatnya Jumlah Akseptor KB di Kab. Lebong	Jumlah Akseptor Pasangan Usia Subur yang diperoleh
Meningkatnya Fasilitas bagi PLKB/PKB, PPKBD dan Sub PPKBD	Jumlah PLKB/PKB, PPKBD dan Sub PPKBD

Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Remaja (Siswa SMP/SMA)
Meningkatnya Kesehatan Ibu, bayi dan anak	Kesehatan Ibu, Bayi dan anak
Adanya Pelayanan Konseling KRR	Persentase pelayanan Konseling KRR
Tertanggulangnya Narkoba, HIV/ AIDS	Jumlah Siswa yang mendapat sosialisasi dan penyuluhan
Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Jumlah Peserta KB Aktif
Meningkatnya informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis Pencapaian Kinerja dilakukan berdasarkan Pengukuran Kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran. Analisis Pencapaian Kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2 . Perbandingan Target Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lebong

Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi di DP3APP dan KB	Persentase Meningkatnya Kelancaran internal SKPD (%)	11	18	21	23	27
Meningkatnya Jumlah Laptop, Printer, peralatan kantor, gedung, dll	<i>Persentase Terpenuhinya sarana prasarana penunjang tugas Aparatur (%)</i>		39	20	20	21
Bertambahnya pakaian PNS dan Non PNS	<i>Persentase meningkatnya disiplin aparatur (%)</i>	-	26	20	30	24
Tersedianya Laporan Keuangan dan Dokumen BPM-PP dan KB	<i>Persentase Meningkatnya tertib perencanaan dan pelaporan (%)</i>		25	25	25	25

Meningkatnya pemberdayaan, Kualitas kehidupan Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menunjang ketahanan keluarga	<i>Persentase Meningkatnya Kualitas Hidup perempuan (%)</i>	8	23	22	23	24
Tersedianya Pelayanan terhadap perempuan dan Anak korban kekerasan	<i>cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)</i>	10	19	22	24	25
Meningkatnya pemberdayaan, Kualitas kehidupan Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menunjang ketahanan keluarga	<i>Meningkatnya Partisipasi perempuan dan anak sebesar 5 %</i>	-	22	24	26	28
Meningkatnya kebijakan bagi perempuan dan anak	<i>Persentase meningkatnya kebijakan terhadap perempuan dan anak yang dirumuskan (%)</i>		24	26	26	25
Meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan pada lembaga yang berbasis gender	<i>Persentase meningkatnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga yang berbasis gender (%)</i>		21	26	26	26
Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	<i>Persentase terkendalinya/ Penurunan angka kelahiran (%)</i>	17	20	23	24	24
Meningkatnya Jumlah Akseptor KB di Kab. Lebong	<i>Persentase Meningkatnya Pelayanan bagi Akseptor KB (%)</i>	6	20	22	25	27
Meningkatnya Fasilitas bagi PLKB/PKB, PPKBD dan Sub PPKBD	<i>Persentase fasilitas bagi petugas PLKB/PKB, PPKBD dan Sub PPKBD (%)</i>	7	16	25	26	26
Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaja	<i>Persentase Meningkatnya remaja (siswa Smp/sma) yang mendapat advokasi (%)</i>	-	25	25	25	25
Adanya Pelayanan Konseling KRR	<i>Persentase Meningkatnya persentase pelayanan bagi remaja yang mau melakukan konseling KRR (%)</i>	-	25	25	25	25
Tertanggulangnya Narkoba, HIV/ AIDS	<i>Persentase Meningkatnya Siswa yang mendapat Sosialisasi (%)</i>		25	25	25	25

Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	<i>Persentase Meningkatnya Jumlah Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga (%)</i>		19	23	27	31
Meningkatnya informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase meningkatnya informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)		25	25	25	25
Berkembangnya Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Model Operasional BKB-Posyandu-PADU		25	25	25	25

- **Analisis Penyebab keberhasilan dan kegagalan Kinerja serta solusi yang telah di lakukan**

Pencapaian keberhasilan kinerja untuk sasaran Meningkatkan kualitas Keluarga Kecil dan sejahtera, Meningkatkan Pembinaan Keluarga yang Ideal yang Sehat dan Sejahtera serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB yang mandiri, Meningkatkan Program Pengendalian Penduduk, Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan Meningkatkan Kualitas Hidup serta Perlindungan anak dan perempuan sangat ditentukan oleh dukungan dana, ketersediaan aparat teknis dan non tehknis, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

Adapun bukti keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana antara lain:

1. Tersedianya Pelayanan KB bagi keluarga miskin sebanyak 150 akseptor
2. Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana sebanyak 7 event
3. Terlaksananya sosialisasi advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan.
4. Terlaksananya Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) berupa kunjungan ke 13 kecamatan
5. Terlaksananya Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak berupa peningkatan kinerja lembaga yang berbasis gender
6. Terlaksananya Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak berupa wilayah binaan GSI sebanyak 4 kecamatan

7. Terlaksananya Pelayanan pemasangan kontrasepsi sebanyak 75 akseptor
8. Terlaksananya Pelayanan KB Untuk Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan
9. Pelayanan KB Untuk Kegiatan TMKK
10. Terlaksananya Pelayanan KB Untuk Kegiatan TMKK
11. Terlaksananya kebijakan perlindungan perempuan di daerah
12. Terlaksananya Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
13. Terlaksananya Fasilitasi Operasional Penyuluh KB

Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut lebih banyak menyangkut lemahnya koordinasi dan pemahaman yang berbeda pada berbagai tingkatan, masih kurangnya tenaga penyuluh di lapangan, dan kondisi geografis serta daerah calclitas.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan menyederhanakan jalur koordinasi secara vertikal maupun horizontal agar program pelaksanaan kegiatan bisa berjalan efektif, peningkatan SDM dan penambahan tenaga penyuluh di lapangan.

3. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Adapun realisasi Anggaran yang di gunakan pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

Tabel 6
Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2018

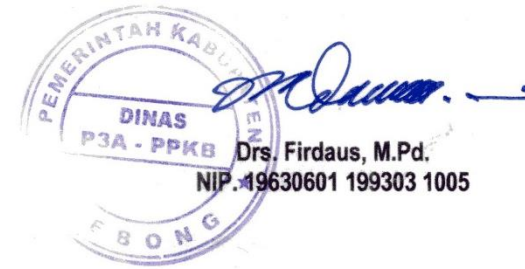
Program dan Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan jasa surat menyurat	40.000.000	39.999.000	1.000	100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000	16.757.821	1.242.179	93
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	98.000.000	97.835.000	165.000	100
Penyediaan jasa administrasi keuangan	243.900.000	243.900.000	-	100
Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.000.000	8.000.000	-	100
Penyediaan alat tulis kantor	150.000.000	150.000.000	-	100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.000.000	24.000.000	-	100
Penyediaan makanan dan minuman	55.000.000	55.000.000	-	100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	160.000.000	159.698.000	302.000	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pengadaan peralatan gedung kantor	35.000.000	34.859.000	141.000	100

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	-	10.000.000	-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.500.000	-	10.500.000	-
Program peningkatan disiplin aparatur				
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	92.400.000	92.347.200	52.800	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Pendidikan dan pelatihan formal	30.000.000	30.000.000	-	100
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	25.000.000	25.000.000	-	100
Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	25.000.000	25.000.000	-	100
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				
Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	43.000.000	43.000.000	-	100
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	20.000.000	20.000.000	-	100
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	37.000.000	-	37.000.000	-
Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera	25.000.000	21.880.000	3.120.000	88
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				

Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	25.000.000	25.000.000	-	100
Program Keluarga Berencana				
Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	18.000.000	17.965.000	35.000	100
Pembinaan Keluarga Berencana	52.300.000	52.300.000	-	100
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	2.929.422.300	2.875.422.300	54.000.000	98
Penyediaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana	244.687.780	244.489.300	198.480	100
Program pelayanan kontrasepsi				
Pelayanan KB Untuk Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan	23.500.000	20.385.000	3.115.000	87
Pelayanan KB Untuk Kegiatan TMKK	30.000.000	30.000.000	-	100
Pelayanan konseling KB	20.000.000	20.000.000	-	100
Pelayanan KB medis operasi	25.000.000	25.000.000	-	100

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				
Fasilitasi Operasional Penyuluh KB	47.700.000	40.650.000	7.050.000	85
JUMLAH	4.565.410.080	4.438.487.621	126.922.459	97

Lebong, Februari 2019
Kepala



PEMERINTAH KABUPATEN
LEBONG
DINAS
P3A - PPKB
Dr. Firdaus, M.Pd.
NIP. 49630601 199303 1005

BAB IV PENUTUP

I. Kesimpulan

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Lebong Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun gagasan Capaian sasaran Strategis
- b. Dalam melaksanakan tugasnya) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Lebong Tahun 2018 berdasarkan pada Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang ditetapkan di RPJMD 2016- 2021, Renstra dan Penetapan Kinerja tahun 2016
- c. Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan telah melaksanakan tugas Pokok dan fungsinya secara efektif, efisien dan akuntabel

II. Saran

Diperlukan Terobosan baru agar pelaksanaan Program menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme Penyusunan Program kerja/Anggaran sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat menurun, dan kualitas Pelayanan KB lebih maksimal serta meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Lebong, Februari 2019
Kepala

